

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan lokal memiliki peran krusial dalam menciptakan pembangunan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kajian dalam literatur place leadership menunjukkan bahwa pemimpin daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan formal, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan berbasis wilayah (place-based development) yang mampu membangun kolaborasi, mendorong inovasi, dan menumbuhkan kapasitas institusional lokal (Horlings et al., 2018). Pemimpin lokal yang kuat mampu menjembatani antar aktor pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama merumuskan visi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal, serta menyesuaikan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika lokal.

Persepsi masyarakat terhadap pemerintah memainkan peran krusial dalam mengukur tingkat legitimasi pemerintahan. Legitimasi tidak hanya dinilai dari mekanisme formal seperti pemilihan langsung atau regulasi, tetapi juga dari kepercayaan (trust) yang tumbuh di antara warga terhadap kemampuan dan niat pemerintah untuk bertindak demi kepentingan publik. Penelitian dalam Public Organization Review menegaskan bahwa praktik governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas secara signifikan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah (Ruitenberg, 2009). Dengan kata lain, ketika masyarakat merasa bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada proses yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan mereka, hal ini memperkuat legitimasi pemerintah di luar ranah formal legalitas.

Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, legitimasi kekuasaan di level daerah tidak semata-mata ditopang oleh kekuatan politik formal atau instrumen hukum, melainkan juga melalui upaya membangun kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada. Hegemoni bekerja

melalui persetujuan (consent), di mana pemimpin berusaha menanamkan nilai, ide, serta kebijakan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta dukungan tanpa paksaan. Dalam konteks pemerintahan daerah, legitimasi kekuasaan muncul ketika masyarakat melihat pemimpin tidak hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai representasi aspirasi dan kepentingan bersama. Dengan demikian, kekuasaan lokal yang hegemonik cenderung lebih stabil karena didukung oleh penerimaan sosial yang kuat, bukan hanya oleh otoritas formal.

Kabupaten Bogor memegang posisi strategis sebagai daerah penyangga utama (buffer zone) Ibu Kota DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat di Jakarta telah turut memicu lonjakan pembangunan dan mobilitas di Kabupaten Bogor, baik dalam bentuk pemukiman padat, lalu lintas dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sebagai wilayah penyangga, Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan signifikan dalam Indeks Pembangunan Daerah, meski disertai tantangan dalam pemerataan ekonomi antar wilayahnya (Rachmawatie, 2024). Posisi geografis Bogor yang berbatasan langsung dengan kota-kota seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang menambah kompleksitas dinamika pertumbuhan, menjadikannya pusat mobilitas, ekonomi kreatif, dan budaya.

Selain memiliki posisi strategis, Kabupaten Bogor juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam pembangunan daerah. Kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi umum, serta fasilitas dasar, masih menjadi persoalan utama di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk. Layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi, sering kali belum merata dan berkualitas, sehingga memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Di sisi lain, upaya meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan tuntutan transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Ketika tantangan-tantangan tersebut tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat persepsi negatif atas kinerja kepemimpinan lokal.

Beragam survei dan penelitian lokal mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor cukup beragam, tergantung pada dimensi yang dinilai. Menurut survei Lembaga Studi Visi Nusantara, kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pertama Bupati Bogor mencapai sekitar 82,54 %. Sektor kebudayaan mendapat apresiasi tertinggi dengan 95,05 %, diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang bersih (92,14 %), serta pelayanan publik (87,56 %), pendidikan (85,40 %), dan kesehatan (85,15 %). Selain itu, hasil evaluasi oleh Ombudsman RI menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik Kabupaten Bogor dari nilai 79,53 pada tahun sebelumnya menjadi 96,15 pada tahun 2023, menempatkannya di kategori A atau zona hijau dengan predikat kualitas layanan tertinggi.

Beberapa anggota keluarga Yasin telah memegang jabatan penting dalam pemerintahan Kabupaten Bogor. Rachmat Yasin menjabat sebagai Bupati Bogor selama dua periode, yaitu sejak 2008 hingga 2014, sebelum digantikan oleh wakilnya setelah terjerat kasus hukum. Sementara itu, adiknya, Ade Yasin seorang pengacara sebelum terjun ke dunia politik memulai karier politis sebagai anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, hingga akhirnya terpilih menjadi Bupati Bogor periode 2018–2022.

Kepemimpinan di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya kesinambungan yang dijalankan oleh keluarga Yasin, di mana beberapa anggotanya pernah menduduki posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Hal ini mencerminkan adanya pola keberlanjutan kepemimpinan yang terjaga, karena masyarakat Kabupaten Bogor pernah merasakan kepemimpinan dari lebih dari satu anggota keluarga tersebut. Keberadaan mereka dalam lingkup pemerintahan daerah tidak hanya menggambarkan proses regenerasi politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengalaman dan pengaruh keluarga dapat menjadi faktor penting dalam pembentukan arah kebijakan serta kinerja pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keberlanjutan kepemimpinan keluarga Yasin di Kabupaten Bogor memunculkan beragam persepsi di kalangan masyarakat. Sebagian warga menilai bahwa kesinambungan tersebut dapat memberikan manfaat positif, terutama dalam

menjaga stabilitas dan melanjutkan program pembangunan yang sudah dirintis sebelumnya. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan kritis yang menyoroti tantangan transparansi, akuntabilitas, serta beberapa isu hukum yang pernah muncul, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kualitas pemerintahan yang dijalankan. Perbedaan persepsi ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai dari hasil pembangunan fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek integritas dan kejelasan tata kelola pemerintahan.

Persepsi masyarakat terbentuk melalui kombinasi pengalaman nyata, paparan media, dan interaksi sosial dengan lingkungan serta orang lain di sekitarnya. Pengalaman langsung seperti merasakan manfaat dari layanan publik atau pembangunan mampu memberikan kesan yang kuat dan personal, sehingga secara langsung membentuk penilaian warga terhadap pemerintah. Di samping itu, baik media tradisional maupun digital menyajikan informasi dan narasi yang memperluas pandangan masyarakat serta memengaruhi persepsi kolektif. Media sosial, misalnya, memungkinkan penyebaran cepat opini dan informasi, yang bisa memperkuat atau mengubah pandangan publik secara cepat dan massal. Interaksi sosial, baik melalui diskusi tatap muka atau online, menjadi sarana warga saling bertukar informasi, meninjau perspektif, dan membangun konsensus lokal terhadap isu-isu tertentu. Proses kolaboratif ini menjadikan persepsi publik sebagai hasil dinamis yang terus berkembang seiring dengan interaksi dan pengalaman sehari-hari.

Dalam menilai kinerja pemerintah daerah, masyarakat biasanya melihat pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi yang langsung dirasakan manfaatnya sehari-hari; pelayanan yang cepat, adil, dan mudah diakses menjadi indikator penting bagi warga dalam menilai sejauh mana pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, mulai dari jalan, transportasi, hingga ruang publik, dipandang sebagai simbol nyata dari kemajuan daerah sekaligus cerminan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, aspek kepemimpinan yang mencakup kedekatan dengan masyarakat, kemampuan komunikasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, turut membentuk persepsi warga apakah pemerintah dianggap dapat

dipercaya atau justru menimbulkan kekecewaan. Ketiga faktor ini secara bersama-sama menjadi tolok ukur masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap legitimasi dan kualitas pemerintahan di tingkat lokal.

Meskipun banyak literatur telah membahas kepemimpinan lokal dan legitimasi politik di Indonesia, fokus terhadap persepsi masyarakat terhadap pemerintahan keluarga Yasin di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Mariana dan Husin telah mengeksplorasi dinamika demokrasi lokal dan dampak kepemimpinan berbasis elite politik, namun cakupannya bersifat umum dan tidak masuk ke konteks spesifik pemerintahan keluarga tertentu (Mariana & Husin, 2017). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat terhadap kekuasaan lokal yang berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggali bagaimana masyarakat memaknai dan merespons gaya kepemimpinan keluarga Yasin, memfokuskan pada persepsi mereka sebagai bentuk legitimasi sosial.

Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang langsung menggali persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan keluarga Yasin di Kabupaten Bogor, sebuah konteks yang selama ini jarang diangkat dalam kajian akademik. Dengan melihat bagaimana masyarakat menilai kinerja, gaya komunikasi, pelayanan publik, serta isu transparansi pemerintah daerah, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang lebih dekat dengan realitas sosial di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai legitimasi kekuasaan berbasis pengalaman langsung warga, bukan semata berdasarkan analisis politik formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai kepemimpinan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik.

Memahami bagaimana masyarakat memandang dan menilai pemimpin lokal menjadi aspek penting dalam memahami legitimasi sosial dan politik bukan sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai pondasi kepercayaan publik. Legitimasi yang kokoh terbentuk bukan hanya dari struktur kekuasaan,

tetapi juga dari dukungan dan pengenalan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Penelitian di bidang public legitimacy menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan warganya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan dianggap adil, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga, terutama dalam konteks demokrasi lokal yang semakin menuntut keterlibatan dan dukungan masyarakat (Marsallindo & Safitri, 2021).

Dalam konteks pemerintahan keluarga Yasin di Kabupaten Bogor, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Dengan menganalisis persepsi publik terhadap pelayanan, pembangunan, komunikasi, maupun isu-isu transparansi, penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah kekuasaan yang dijalankan mendapatkan konsensus sosial, sehingga mencerminkan kekuatan hegemoni yang sebenarnya. Pada akhirnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang cara legitimasi politik lokal dibangun baik dari aspek formal maupun dari dukungan masyarakat yang nyata.

Hasil penelitian ini memiliki urgensi praktis karena dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan memahami bagaimana masyarakat menilai pelayanan publik, pembangunan, serta aspek transparansi, pemerintah dapat mengetahui area mana yang sudah dianggap memadai dan bagian mana yang masih menimbulkan ketidakpuasan. Informasi ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif, memperbaiki kelemahan dalam penyediaan layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya, pemetaan persepsi publik melalui penelitian ini dapat menjadi landasan strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga Kabupaten Bogor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Rahmat Yasin sebagai Bupati Bogor?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan tersebut?

3. Bagaimana penilaian dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan keluarga Yasin di Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan Rahmat Yasin saat menjabat sebagai Bupati Bogor.
2. Menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat terkait kepemimpinan keluarga Yasin.
3. Untuk memahami penilaian dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan keluarga Yasin di Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yaitu:

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hegemoni dengan menyoroti bagaimana persepsi masyarakat terhadap Pemerintahan Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor. Hal ini dapat memperluas pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam konteks politik lokal di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor.

- Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi dan referensi mengenai persepsi masyarakat terhadap dinasti politik.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dilakukan secara deduksi yang berarti penulisan dilakukan dari konteks secara umum ke konteks yang lebih khusus. Untuk melihat penelitian yang akan dilakukan secara teratur, maka dibentuklah sebuah sistematika penulisan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan, penulis memberikan gambaran umum tentang latar belakang fenomena politik yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor dengan mengutip dari beberapa sumber dan survey nasional maupun internasional. Bab I terdiri dari:

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, peneliti memberikan sumber penelitian terdahulu dan menguraikan berbagai macam konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis juga menjabarkan teori yang digunakan untuk menganalisis "Persepsi Masyarakat terhadap Pemerintahan Keluarga Yasin di Kabupaten Bogor" yaitu dengan menggunakan teori Hegemoni. Teori ini melihat bagaimana kekuasaan dipertahankan bukan hanya lewat kekuatan, tapi lewat persetujuan, Bab II terdiri dari:

2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Kerangka Konsep

2.3 Kerangka Teori

2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini, menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kemudian masuk

kedalam tahapan analisis dengan melalui tahapan pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

Bab III terdiri dari:

- 3.1 Pendekatan Penelitian
- 3.2 Penentuan Informan
- 3.3 Teknik Pengumpulan Data
- 3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- 3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran terkait hasil penelitian di lapangan terkait tentang pembahasan dari rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, dan menganalisis data menggunakan teori. Bab IV terdiri dari:

- 4.1 Hasil Penelitian
- 4.2 Pembahasan
- 4.3 Analisis Teori Hegemoni Antonio Gramsci

BAB V PENUTUP

Merangkum poin-poin penting dari penelitian atau pembahasan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Bab V terdiri dari:

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

